

**EVALUASI SISTEM ZONASI PADA PPDB TINGKAT SMA
UNTUK PEMERATAAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN
DI KECAMATAN MAKASAR KOTA JAKARTA TIMUR**

Nova Eliza Hotmimaida
NPP.32.0350

Asdaf Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta
Program Studi Administrasi Pemerintahan Daerah
Email : novaeliza0411@gmail.com

Pembimbing Skripsi : Dr.Asep Hendra S.E., M.M

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): Makasar District had the highest student-to-school ratio in East Jakarta, reaching 451.90 in 2022. Additionally, the presence of educational blankspot areas in Makasar Subdistrict indicates unequal access to public senior high schools (SMA Negeri). **Purpose:** This study aims to evaluate the implementation of the zoning system in the senior high school student admission process (PPDB) in Makasar District. **Method:** This research employs a descriptive qualitative method using the CIPP evaluation model by Stufflebeam. Data were collected through interviews, observations, and documentation. **Result:** The zoning system has been implemented in accordance with existing regulations and has improved equitable access to education. However, challenges remain, such as uneven distribution of public schools, mismatches between school capacity and regulatory requirements, and disparities in student quality. **Conclusion:** The zoning system in Makasar District is fairly effective in promoting equitable access to education, although it has not yet reached optimal implementation. Improvement efforts include zoning area adjustments, the "PPDB Bersama" program, and differentiated learning approaches.

Keywords: Zoning, PPDB, Evaluation, CIPP, Equity, Education

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Kecamatan Makasar memiliki rasio murid terhadap sekolah tertinggi di Jakarta Timur, yaitu 451,90 pada tahun 2022, serta adanya wilayah blankspot pendidikan di Kelurahan Makasar, yang menunjukkan ketimpangan akses terhadap SMA Negeri. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan mengevaluasi pelaksanaan sistem zonasi PPDB tingkat SMA di Kecamatan Makasar. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan model evaluasi CIPP oleh Stufflebeam. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Sistem zonasi telah berjalan sesuai regulasi dan meningkatkan pemerataan akses pendidikan. Namun, masih terdapat hambatan seperti ketimpangan distribusi sekolah, ketidaksesuaian daya tampung dengan regulasi, dan perbedaan kualitas siswa. **Kesimpulan:** Sistem zonasi di Kecamatan Makasar cukup efektif dalam pemerataan akses pendidikan namun masih belum optimal. Upaya perbaikan dilakukan melalui penataan zonasi, program "PPDB Bersama", dan pembelajaran diferensiasi.

Kata Kunci: Zonasi, PPDB, Evaluasi, CIPP, Pemerataan, Pendidikan

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) diterapkan sebagai kebijakan strategis untuk mendorong pemerataan akses dan kualitas pendidikan. Namun dalam pelaksanaannya, sistem ini menimbulkan berbagai polemik, terutama di wilayah padat penduduk seperti Jakarta Timur. Berbagai kajian mengungkap bahwa kebijakan zonasi di tingkat SMA sering kali dianggap membatasi kebebasan siswa dalam memilih sekolah sesuai minat dan potensi, serta berdampak pada motivasi belajar dan psikologis siswa. Selain aspek teknis seperti seleksi berbasis usia dan pembagian wilayah RT, sistem ini juga menuntut kesiapan dari sisi sarana prasarana, distribusi sekolah, dan keterlibatan semua pemangku kepentingan dalam tata kelola pendidikan yang inklusif dan akuntabel.

Kondisi ini semakin kompleks di Kecamatan Makasar, Jakarta Timur, yang memiliki rasio murid terhadap sekolah tertinggi di wilayah tersebut, yakni 451,90 pada tahun 2022 (BPS, 2023). Rasio ini menunjukkan tingginya tekanan daya tampung pada sekolah-sekolah negeri, serta mencerminkan ketimpangan akses yang semakin diperparah dengan masih adanya wilayah blankspot pendidikan seperti di Kelurahan Makasar. Situasi ini menimbulkan urgensi untuk mengevaluasi sejauh mana sistem zonasi PPDB mampu mencapai tujuannya, khususnya dalam konteks pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di tingkat SMA dirancang sebagai upaya strategis untuk mewujudkan pemerataan akses pendidikan, mengurangi kesenjangan kualitas antar sekolah, dan mendorong integrasi sosial. Namun, sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa implementasi sistem ini belum sepenuhnya efektif. Penelitian oleh Novi Winarti dkk. (2023) menyoroti bahwa sistem zonasi belum berhasil menjamin keadilan akses pendidikan, terutama karena ketimpangan jumlah dan kualitas sekolah di tiap wilayah. Hiskia Renaldi Setiawan (2021) juga mencatat bahwa pada praktiknya, penerapan zonasi menimbulkan tantangan berupa penumpukan siswa di sekolah tertentu, rendahnya transparansi pelaksanaan, serta ketidakpuasan masyarakat terhadap mekanisme seleksi. Sayangnya, kajian-kajian ini masih didominasi oleh konteks wilayah dengan karakteristik suburban atau semi-perkotaan, sementara kajian spesifik pada wilayah padat penduduk urban seperti Kecamatan Makasar masih sangat terbatas.

Padahal, Kecamatan Makasar merupakan kecamatan dengan rasio murid terhadap sekolah tertinggi di Jakarta Timur, yaitu 451,90 pada tahun 2022 (BPS Jakarta Timur, 2023), jauh di atas rata-rata rasio ideal. Wilayah ini juga menghadapi ketimpangan distribusi SMA Negeri dengan Kelurahan Makasar masuk dalam kategori blankspot pendidikan, karena tidak memiliki sekolah menengah atas negeri maupun swasta. Berdasarkan data PPDB DKI Jakarta tahun 2024, dari 51.302 pendaftar jalur zonasi di Jakarta Timur, hanya 14.168 siswa (27,6%) yang dapat tertampung, menyisakan 72,4% siswa yang tidak diterima di sekolah dalam zonanya. Khusus di Jakarta Timur, 39 SMA Negeri hanya memiliki total daya tampung 10.201 siswa, sementara 37 SMA Swasta di wilayah ini hanya mampu menampung sekitar 724 siswa, menunjukkan minimnya alternatif sekolah berkualitas. Kondisi ini diperparah dengan segmentasi kuota zonasi yang terbagi dalam tiga prioritas berdasarkan RT, di mana kasus satu RT diterima sementara RT lain yang berdekatan tidak, sering kali memicu keluhan masyarakat (DPRD DKI Jakarta, 2024). Dengan kompleksitas tersebut, penelitian ini mengisi kekosongan kajian evaluatif sistem zonasi di wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi dan distribusi sekolah yang timpang.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang digunakan peneliti sebagai referensi dan acuan antara lain, Solehudin (2024) dalam penelitiannya di DKI Jakarta menunjukkan bahwa sistem zonasi belum menjamin keadilan pendidikan, terutama bagi masyarakat kurang mampu yang terkendala secara ekonomi, akses, dan administratif. Kebijakan ini bahkan dianggap mengabaikan hak-hak konstitusional warga untuk mendapatkan pendidikan yang layak, karena perbedaan geografis dan kemampuan seringkali justru menjadi penghalang. Bulkani et al. (2023) membuktikan bahwa jalur masuk siswa ke SMP melalui zonasi, prestasi, afirmasi, atau perpindahan tugas orang tua tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap prestasi belajar. Penelitian ini juga menegaskan bahwa prestasi belajar di tingkat sekolah dasar hanya memiliki daya prediksi yang lemah terhadap capaian siswa di jenjang selanjutnya. Hal ini menunjukkan bahwa sistem zonasi tidak dapat dijadikan tolok ukur utama dalam menilai kemampuan akademik siswa.

Sulistiyosari et al. (2023) menemukan bahwa jumlah kursi sekolah negeri yang terbatas dan tidak merata menjadi hambatan utama dalam pemerataan akses pendidikan. Selain itu, masih terdapat ketidaksamaan pemahaman antara pemangku kebijakan mengenai tujuan zonasi, serta kurangnya perhatian terhadap dampak jangka panjang, seperti penurunan reputasi sekolah unggulan karena harus menerima siswa dengan latar belakang akademik yang sangat beragam. Ardi et al. (2023), melalui kajian Systematic Literature Review, mengidentifikasi beberapa permasalahan utama dalam penerapan zonasi, seperti ketidakadilan dalam penetapan batas zona, kurangnya transparansi dalam proses pendaftaran, serta rendahnya partisipasi aktif masyarakat. Mereka merekomendasikan perlunya penguatan infrastruktur pendidikan dan pengawasan proses zonasi untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan. Ma'rifatin et al. (2023) juga menyoroti tantangan dalam pelaksanaan zonasi, seperti belum siapnya pemerintah daerah dalam pemetaan zonasi dan masih kuatnya paradigma masyarakat terhadap sekolah favorit. Hal ini memperkuat temuan bahwa implementasi kebijakan ini belum sepenuhnya mampu mengubah pola pikir dan budaya pendidikan masyarakat.

Penelitian oleh Baskara (2022) di Kota Tarakan menemukan hambatan pelaksanaan zonasi berasal dari eksternal, seperti anggapan masyarakat terhadap sekolah unggulan dan kecurangan administratif. Belum adanya upaya konkret dari dinas terkait juga memperburuk persepsi publik terhadap kebijakan ini. Sementara itu, Mujahidah et al. (2024) menggunakan model evaluasi CIPP dalam mengevaluasi zonasi PPDB tingkat SMP di Sidoarjo. Hasilnya menunjukkan bahwa meskipun aspek efektivitas dan kecukupan cukup tercapai, aspek responsivitas dan pemerataan masih menjadi persoalan. Evaluasi ini menekankan pentingnya pemetaan zona yang adil dan penyesuaian terhadap kebutuhan siswa di berbagai wilayah. Winarti et al. (2023) dalam konteks Kota Tanjungpinang menyoroti dampak kebijakan zonasi terhadap ketimpangan distribusi siswa yang ekstrem, bahkan menyebabkan penutupan sekolah dasar karena kekurangan siswa. Mereka juga menggarisbawahi belum jelasnya kriteria zonasi dan rendahnya transparansi dalam pelaksanaan.

Berdasarkan tinjauan tersebut, terlihat bahwa sistem zonasi PPDB secara nasional masih menghadapi tantangan dari segi keadilan akses, kualitas pelaksanaan, serta penerimaan masyarakat. Penelitian-penelitian sebelumnya belum secara spesifik mengevaluasi implementasi sistem zonasi PPDB tingkat SMA di wilayah padat seperti Kecamatan Makasar, Jakarta Timur, yang memiliki rasio murid terhadap sekolah tertinggi di wilayah tersebut (451,90 pada tahun 2022) serta adanya wilayah blankspot pendidikan. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan pendekatan evaluatif menggunakan model CIPP, guna memberikan gambaran komprehensif mengenai efektivitas kebijakan zonasi dalam mewujudkan pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan di wilayah perkotaan padat penduduk.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini merupakan kebaruan karena belum ada kajian yang secara khusus mengevaluasi zonasi di wilayah ini, yang memiliki rasio murid terhadap sekolah tertinggi di Jakarta Timur serta wilayah blankspot pendidikan. Sebagian besar penelitian sebelumnya hanya menyoroti zonasi dari aspek persepsi atau teknologi pemetaan. Selain itu, penelitian ini menggunakan model evaluasi CIPP sebagai pisau analisis untuk menilai sistem zonasi secara menyeluruh. Penggunaan model ini dalam konteks wilayah urban padat seperti Kecamatan Makasar memberikan sudut pandang baru dalam mengevaluasi kebijakan pemerataan pendidikan.

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan sistem zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMA di Kecamatan Makasar, Jakarta Timur, dalam rangka pemerataan akses dan peningkatan kualitas pendidikan melalui model evaluasi CIPP (*Context, Input, Process, Product*).

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, menurut Simangunsong (2017) metode penelitian kualitatif dapat dikatakan sebagai penelitian partisipatif yang desain penelitiannya mempunyai sifat fleksibel atau dapat berubah guna menyesuaikan perencanaan yang telah dibuat dengan gejala yang ada pada tempat penelitian sebenarnya. Dengan metode evaluasi model CIPP (*Context, Input, Process, Product*) yang dikembangkan oleh Stufflebeam (2003) digunakan untuk menilai secara menyeluruh pelaksanaan sistem zonasi PPDB berdasarkan konteks kebijakan, sumber daya, proses pelaksanaan, serta hasil yang dicapai. Sehingga pendekatan ini mampu menggambarkan secara mendalam berbagai dinamika dan hambatan dalam implementasi sistem zonasi di Kecamatan Makasar, Jakarta Timur. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi.

Penulis mewawancarai 14 orang informan, yang terdiri dari Ketua Sub Kelompok Peserta Didik dan Pembangunan Karakter (PDPK) Bidang SMA Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Kepala Seksi Pendidikan Menengah, Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Timur, Ketua Panitia PPDB tingkat sekolah, Kepala Sekolah SMA Negeri di Kecamatan Makasar, guru, orang tua siswa, dan siswa setempat yang memiliki keterlibatan dan perhatian terhadap pelaksanaan zonasi PPDB. Observasi dilakukan pada proses pelaksanaan PPDB SMA Negeri di Kecamatan Makasar. Dokumentasi diperoleh dari data PPDB tahun 2022–2024, data daya tampung sekolah, serta dokumen peraturan terkait seperti Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 dan Keputusan Gubernur DKI Jakarta. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles & Huberman, 1992). Untuk mengevaluasi sistem zonasi, penulis mengkaji masing-masing komponen model CIPP: *context* (latar belakang kebijakan dan kondisi wilayah), *input* (ketersediaan sarana prasarana, daya tampung sekolah), *process* (mekanisme pelaksanaan PPDB), dan *product* (hasil pemerataan akses serta dampaknya terhadap kualitas pendidikan). Pendekatan ini digunakan agar hasil evaluasi bersifat komprehensif dan dapat dijadikan dasar perbaikan kebijakan zonasi di masa mendatang.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis pelaksanaan PPDB system zonasi tingkat SMA di Kecamatan Makasar dengan menggunakan pendekatan model evaluasi CIPP (*Context, Input, Process, Product*). Model ini digunakan untuk mengukur efektivitas kebijakan dengan meninjau dari aspek latar belakang kebijakan,

kesiapan sumber daya, proses implementasi, serta hasil yang dicapai. Adapun pembahasan lebih lanjut disajikan pada subbab-subbab berikut :

3.1. Evaluasi Sistem Zonasi pada PPDB Tingkat SMA di Kecamatan Makasar, Kota Jakarta Timur dengan Model CIPP

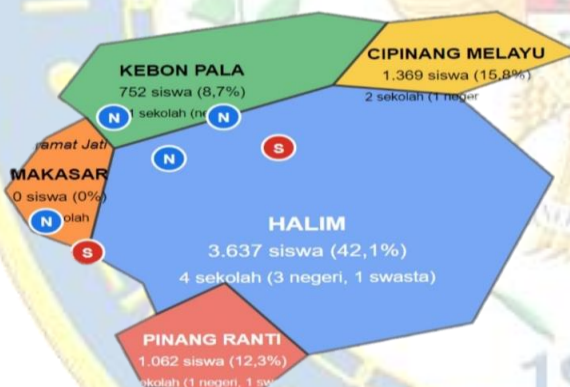
Evaluasi ini menggunakan model CIPP (Context, Input, Process, Product) yang dikembangkan oleh Daniel Stufflebeam, guna menganalisis secara menyeluruh terhadap berbagai aspek pelaksanaan program. Analisis ini terbagi menjadi empat dimensi yaitu :

- 1) Evaluasi Konteks
- 2) Evaluasi Input
- 3) Evaluasi Proses
- 4) Evaluasi Produk

3.1.1 Evaluasi Konteks

Tujuan utama dari evaluasi konteks adalah memahami secara menyeluruh kondisi lingkungan tempat suatu program diterapkan. Sejalan dengan temuan Hendrawansyah dan Zamroni (2020) yang menunjukkan bahwa regulasi penetapan zona yang belum jelas, kurangnya sosialisasi bisa menjadi hambatan dalam implementasi kebijakan zonasi. Dengan pendekatan ini, evaluasi tidak hanya menggambarkan karakteristik wilayah secara umum, tetapi juga menyoroti faktor-faktor spesifik yang dapat memengaruhi efektivitas program. Dimensi ini terdiri atas tiga indikator :

- 1) Penetapan wilayah zonasi
- 2) penentuan persentase daya tampung
- 3) penerbitan juknis PPDB



Sumber : DAPODIK, Diolah Penulis (2025)

Gambar 3.1
Peta Persebaran SMA di Kecamatan
Makasar Tahun 2025

Indikator pertama, penetapan wilayah zonasi PPDB SMA di Kecamatan Makasar telah mengacu pada Permendikbud No. 1 Tahun 2021 Pasal 20 ayat (2), yang mewajibkan pertimbangan atas sebaran sekolah, domisili calon peserta didik, dan kapasitas daya tampung sekolah. Namun, implementasinya di lapangan masih menghadapi sejumlah tantangan struktural. Dari sisi sebaran sekolah, terdapat ketimpangan distribusi yang signifikan. Dari total 5 SMA Negeri di Kecamatan Makasar, sebagian besar terkonsentrasi di Kelurahan Halim Perdana Kusuma, sementara Kelurahan Makasar menjadi wilayah blank spot tanpa satu pun SMA Negeri atau swasta. Kondisi ini menyulitkan pemerataan akses pendidikan antar wilayah kelurahan.

Kemudian sebaran domisili calon peserta didik juga tidak merata. Data tahun 2023 menunjukkan bahwa Kelurahan Kebon Pala dan Cipinang Melayu menyumbang hampir 50% populasi kecamatan, sedangkan Kelurahan Makasar meskipun memiliki luas kecil, mencatat kepadatan penduduk tertinggi (30.184 jiwa/km²). Hal ini menciptakan ketimpangan akses terhadap SMA Negeri, terutama bagi siswa dari Kelurahan Makasar. Kapasitas daya tampung turut menjadi faktor penentu. Lima SMA Negeri di Kecamatan Makasar memiliki total daya tampung 1.380 siswa, dengan SMAN

81 Jakarta sebagai penyumbang daya tampung terbesar (23,5%). Penetapan kuota PPDB dilakukan berdasarkan data Dapodik, prediksi bangku kosong, dan evaluasi historis keterisian rombel.

Indikator kedua, Penentuan kuota jalur PPDB di DKI Jakarta, di Kecamatan Makasar, telah disusun selaras dengan Permendikbud No. 1 Tahun 2021, yang mengatur jalur zonasi minimal 50%, afirmasi minimal 15%, perpindahan tugas orang tua/wali maksimal 5%, dan sisanya untuk jalur prestasi. Ketentuan tersebut kemudian diperkuat melalui Pergub DKI Jakarta No. 15 Tahun 2024 dan diimplementasikan secara teknis dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta No. 93 Tahun 2024.

Jalur	% (Permendikbud No. 1 Th. 2021)			% (Pergub No 15 Th. 2024)				Catatan
	SD	SMP	SMA	SD	SMP	SMA	SMK	
Zonasi	Min 70%	Min 50%	Min 50%	73%	50%	50%	-	
Afirmasi	Min 15%	Min 15%	Min 15%	25%	25%	25%	Max 43%	Komitmen Pemerintah untuk memberikan kesempatan pendidikan berkualitas pada keluarga tidak mampu dan Penyandang Disabilitas (2 peserta didik per rombel)
Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali dan/atau Jalur Anak Guru/Tenaga Kependidikan	Max 5%	Max 5%	Max 5%	2%	2%	2%	2%	Kuota diprioritaskan untuk Jalur PTO/Wali
Prestasi Non Akademik	-	Jika ada sisa kuota	Jika ada sisa kuota	-	5%	5%	5%	Pendidikan ditujukan untuk mengoptimalkan tumbuh kembang anak secara holistik (Akademik & Non Akademik)
Prestasi Akademik				-	18%	18%	50%	

Sumber : File Sosialisasi PPDB Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, 2024

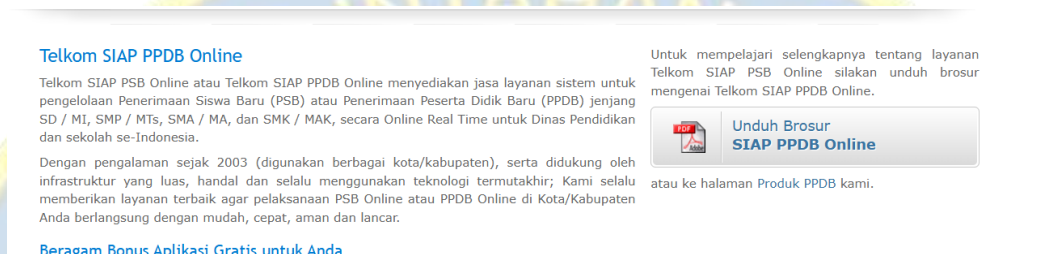
Gambar 3.2
Perbandingan Kuota PPDB Per Jalur antara Permendikbud No.1 Tahun 2021 dengan Pergub No.15 Tahun 2024

Hasil wawancara dengan Ketua Sub Kelompok PDPK Bidang SMA, Bapak Ujang Suherman, makin memperkuat bahwa sistem ini dirancang berbasis regulasi yang konsisten antara pusat dan daerah, serta disesuaikan dengan kondisi lokal. Analisis perbandingan regulasi pusat dan daerah menunjukkan bahwa proporsi daya tampung di setiap jalur PPDB di Jakarta telah mengikuti kebijakan nasional dengan penyesuaian teknis di tingkat provinsi. Hal ini menunjukkan bahwa penentuan kuota PPDB di Kecamatan Makasar telah dilaksanakan secara legal-formal, konsisten, dan adaptif terhadap kebutuhan lokal.

Indikator ketiga, Penerbitan Petunjuk Teknis (Juknis), telah dilakukan secara tepat waktu dan substantif sesuai regulasi nasional. Berdasarkan SK Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta No. 93 Tahun 2024, Juknis ditetapkan pada 2 April 2024, dua bulan sebelum jadwal pendaftaran PPDB, sehingga memberikan ruang bagi sekolah dan masyarakat untuk memahami alur teknis pelaksanaan. Isi Juknis selaras dengan Permendikbud No. 1 Tahun 2021, baik dalam prinsip pelaksanaan (objektivitas, transparansi, akuntabilitas, keadilan) maupun proporsi jalur penerimaan. Uniknya, sistem zonasi di DKI Jakarta menerapkan pendekatan berbasis Rukun Tetangga (RT), bukan jarak, untuk menyesuaikan kondisi geografis perkotaan Jakarta.

3.1.2 Evaluasi Input

Dalam evaluasi input Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tingkat SMA berbasis zonasi di Kecamatan Makasar, Jakarta Timur, dua indikator utama yang dianalisis adalah Aplikasi PPDB Online dan Sosialisasi kepada Pemangku Kepentingan. Pelaksanaan PPDB jenjang SMA di Kecamatan Makasar telah memanfaatkan aplikasi PPDB Online sebagai platform resmi pendaftaran daring. Sistem ini dikembangkan oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta bekerja sama dengan PT. Telkom Indonesia, dan diakses melalui laman resmi <https://ppdb.jakarta.go.id> serta aplikasi Siap PPDB.



Sumber : Situs Web Arsip SIAP PPDB 2024/2025 (Diakses pada 10 Maret 2025)

Gambar 3.3
Telkom Siap PPDB Online

Aplikasi ini memungkinkan calon peserta didik dan orang tua untuk melakukan pendaftaran, unggah dokumen, verifikasi data, serta memantau hasil seleksi secara real-time, yang mendukung prinsip transparansi dan efisiensi. Berdasarkan observasi dan wawancara, fitur-fitur seperti pengecekan zonasi, status akun, dan informasi sekolah sangat membantu proses seleksi. Penggunaan aplikasi ini juga didukung dengan kesiapan infrastruktur di sekolah-sekolah yang memiliki sarana internet dan komputer yang memadai. Respon dari orang tua dan siswa menunjukkan bahwa aplikasi ini mudah diakses, informatif, dan mempercepat proses PPDB, terutama dalam jalur zonasi. Dengan sistem yang terintegrasi dan bantuan posko daring, aplikasi PPDB Online terbukti efektif dalam mendukung pelaksanaan PPDB di Kecamatan Makasar, serta mencerminkan komitmen pemerintah provinsi dalam memanfaatkan teknologi untuk pelayanan publik pendidikan.

Indikator kedua, sosialisasi PPDB zonasi di Kecamatan Makasar, dilakukan secara intensif oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta untuk memastikan pemahaman menyeluruh dari seluruh pemangku kepentingan. Sosialisasi dilakukan melalui berbagai media, seperti website resmi PPDB, media sosial (Instagram, YouTube, Facebook), webinar, serta grup WhatsApp antar sekolah. Informasi disampaikan jauh sebelum masa pendaftaran dimulai, yaitu sejak 19 Mei 2024, sementara pendaftaran dimulai pada 10 Juni 2024. Materi sosialisasi mencakup mekanisme seleksi, jalur masuk, dan teknis zonasi berbasis RT, bukan jarak.



Sumber : Instagram Dinas Provinsi DKI Jakarta (Diakses pada 11 Maret 2025)

Gambar 3.4
Sosialisasi Informasi PPDB di Instagram Dinas Provinsi DKI Jakarta

Sosialisasi ini juga diperkuat dengan koordinasi lintas OPD, antara lain :

1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) : Berperan dalam verifikasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) calon peserta didik untuk memastikan validitas data kependudukan.
2. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang : Memanfaatkan aplikasi Peta Jakarta Satu dalam penentuan dan verifikasi wilayah zonasi, memastikan kesesuaian lokasi tempat tinggal calon peserta didik dengan zona sekolah yang ditetapkan.
3. Dinas Sosial: Menentukan kelayakan calon peserta didik untuk menerima bantuan pendidikan seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan jalur afirmasi lainnya.
4. Dinas Perhubungan: Memberikan jalur afirmasi khusus bagi anak pegawai JakLingko, sebagai bentuk apresiasi dan dukungan terhadap pekerja di sektor transportasi publik.

Untuk mendukung proses sosialisasi, sekolah difasilitasi dengan posko PPDB, pelatihan teknis untuk operator, dan sesi koordinasi dari dinas kepada kepala sekolah. Secara keseluruhan, sosialisasi telah berjalan sistematis, luas, dan adaptif terhadap kondisi lokal, memperkuat kesiapan pelaksanaan PPDB berbasis zonasi di Kecamatan Makasar.

3.1.3 Evaluasi Proses

Dimensi evaluasi proses dalam pelaksanaan program PPDB berbasis zonasi mencakup pengumuman PPDB, pendaftaran, seleksi, pengumuman hasil, hingga penanganan masalah. Pertama, Pengumuman PPDB di Kecamatan Makasar, Jakarta Timur, dilakukan secara sistematis dan multikanal oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Informasi terkait jadwal, jalur penerimaan, persyaratan, dan tata cara pendaftaran diumumkan sejak 19 Mei 2024, jauh sebelum pendaftaran dimulai, melalui:

1. Media digital seperti website resmi <https://ppdb.jakarta.go.id>, Instagram, dan YouTube.
2. Media fisik, seperti brosur dan pengumuman yang ditempel di sekolah.
3. Webinar dan surat edaran ke sekolah-sekolah.

Penggunaan Instagram dan podcast YouTube terbukti efektif menjangkau siswa dan orang tua, dengan konten infografis dan admin yang responsif. Sekolah juga diwajibkan untuk memasang pengumuman secara fisik dan dilakukan monitoring oleh pihak dinas. Hasil wawancara dengan siswa, orang tua, dan pejabat sekolah menunjukkan bahwa pengumuman disampaikan dengan tepat waktu, mudah diakses, dan komunikatif.

Kedua, Pendaftaran PPDB jenjang SMA di Kecamatan Makasar tahun ajaran 2024/2025 dilakukan secara daring melalui situs resmi <https://ppdb.jakarta.go.id>, sesuai dengan SK Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta No. 93 Tahun 2024. Tahapan pendaftaran meliputi:

1. Pengajuan akun dan verifikasi KK,
2. Aktivasi PIN/Token,
3. Pemilihan sekolah tujuan, dan
4. Pemantauan hasil seleksi.

Sistem ini memungkinkan CPDB mendaftar secara mandiri dari rumah. Namun, berdasarkan wawancara dengan panitia PPDB SMAN 9, masih ditemukan kendala teknis, terutama saat pembuatan akun dan unggah dokumen. Untuk mengatasi hal ini, sekolah menyediakan posko bantuan lengkap dengan komputer dan akses internet. Berdasarkan observasi dan wawancara, sistem PPDB daring telah berjalan terstruktur, transparan, dan adaptif, meskipun memerlukan pendampingan teknis di lapangan. Kehadiran posko PPDB di sekolah menjadi kunci untuk mendukung akses pendidikan yang inklusif dan merata.

Ketiga, Seleksi PPDB jalur zonasi SMA di Kecamatan Makasar menggunakan sistem prioritas berbasis RT (Prioritas 1, 2, dan 3), bukan jarak langsung, disesuaikan dengan karakteristik geografis Jakarta. Kuota jalur zonasi ditetapkan sebesar 50% dari daya tampung masing-masing sekolah.

Seleksi dilakukan secara otomatis melalui sistem PPDB DKI Jakarta dan berdasarkan urutan: prioritas zona → usia → urutan pilihan sekolah → waktu pendaftaran. Namun, hasil observasi menunjukkan ketidaksesuaian daya tampung zonasi aktual di sistem PPDB online dibandingkan yang ditetapkan dalam SK Dinas Pendidikan, dengan total selisih 19 kursi dari 5 SMA negeri. Padahal menurut Sururama & Vowel (2021) menyatakan *“There are eight standards in the government education system, namely content standards, process standards, graduate competency standards, educator and education staff standards, facilities and infrastructure standards, management standards, financing standards and assessment standards”* menekankan pentingnya penerapan standar pendidikan secara komprehensif sebagai tolok ukur keberhasilan suatu sistem pendidikan, termasuk dalam hal sistem zonasi. Dalam konteks PPDB zonasi, implementasi yang tidak optimal terhadap standar manajemen dan fasilitas pendidikan (contohnya ketidaksesuaian daya tampung dan keterbatasan sebaran sekolah) mencerminkan hambatan terhadap pencapaian standar yang disebutkan.

Tabel 3.1
Seleksi PPDB SMA Jalur Zonasi di Kec.Makasar Tahun 2024/2025

Nama Sekolah	Daya Tampung Zonasi (Sesuai Regulasi)	Daya Tampung Zonasi (Yang tersedia di PPDB Online)
SMAN 9	126	121
SMAN 42	129	126
SMAN 48	144	139
SMAN 67	129	125
SMAN 81	162	160
Jumlah	690	671

Sumber : Arsip PPDB Online 2024/2025 (Diolah Penulis, 2025)

Tabel 3.2
Kategori Zonasi Hasil Seleksi PPDB SMA
di Kecamatan Makasar Tahun 2024

Nama Sekolah	Kategori Zonasi			Jumlah
	Prioritas 1	Prioritas 2	Prioritas 3	
SMAN 9	25	42	54	121
SMAN 42	22	74	30	126
SMAN 48	39	55	45	139
SMAN 67	26	99	-	125
SMAN 81	100	60	-	160

Sumber : Arsip PPDB Online 2024/2025 (Diolah Penulis, 2025)

Data hasil seleksi juga menunjukkan ketimpangan pemanfaatan zona prioritas:

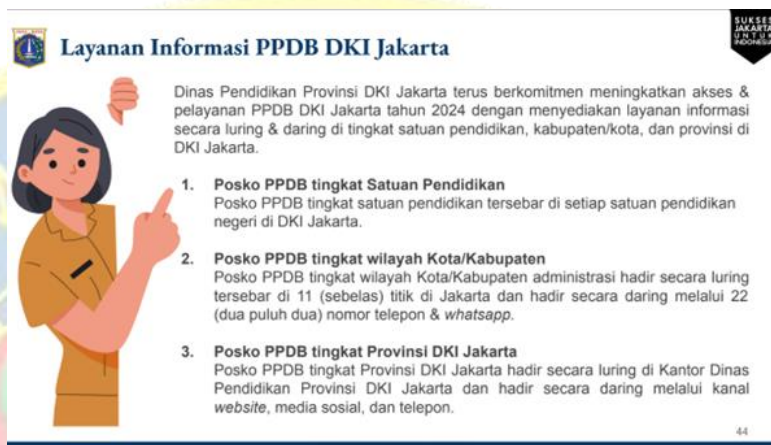
- SMAN 81 dominan dari Prioritas 1 (zona dekat),
- SMAN 67 dan SMAN 42 mayoritas dari Prioritas 2,
- SMAN 9 lebih banyak dari Prioritas 3, menunjukkan rendahnya minat dari zona terdekat.

Keterbatasan jumlah SMA Negeri, terutama di Kelurahan Makasar yang menjadi *blank spot*, menyebabkan akses tidak merata. Namun ada program PPDB Bersama sebagai alternatif masuk sekolah swasta mitra pemerintah dengan biaya terjangkau bagi siswa tidak lolos seleksi negeri.

Keempat, pengumuman hasil seleksi PPDB jalur zonasi di Kecamatan Makasar, dilakukan secara online melalui situs resmi <https://ppdb.jakarta.go.id>, dengan proses yang bersifat real-time dan transparan. Namun, untuk mengantisipasi kendala teknis, sekolah seperti SMAN 9, 42, dan 67 juga menyediakan pengumuman luring di papan informasi sekolah, agar informasi tetap dapat dijangkau semua pihak. Sebagian orang tua dan siswa tetap datang ke sekolah untuk memastikan hasil secara langsung, walau informasi sudah tersedia di web. Beberapa siswa juga mengalami akses lambat atau gangguan teknis, namun tetap bisa melihat hasil dengan sistem yang terbuka dan mudah dipantau.

Kelima, penanganan masalah dalam pelaksanaan PPDB zonasi di Kecamatan Makasar telah

dirancang cukup komprehensif oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Permasalahan umum yang muncul meliputi kesalahan input data, kendala teknis saat mengakses sistem, dan ketidaksesuaian dokumen. Untuk menanganinya, disediakan posko layanan di sekolah, posko kota/kabupaten, serta kanal digital seperti JakLapor dan CRM DKI.



Sumber : File Sosialisasi PPDB Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, 2024

Gambar 3.5
Layanan Informasi PPDB DKI Jakarta

Sekolah seperti SMAN 42, 67, dan 9 menyiapkan tim bantuan teknis untuk mendampingi CPDB yang mengalami kesulitan teknis. Panitia sekolah menunjukkan kesiapan dalam verifikasi data dan penguasaan sistem. Namun, ditemukan beberapa keluhan dari orang tua tentang lambatnya respons bila pengaduan diteruskan ke tingkat lebih tinggi, serta masih ada yang kesulitan mengakses kanal pengaduan digital. Evaluasi juga menunjukkan bahwa sistem masih memiliki tantangan dalam verifikasi domisili, terutama bagi siswa yang berpindah alamat. Namun, melalui koordinasi lintas instansi seperti Dukcapil dan Dinas Cipta Karya, sebagian besar permasalahan dapat segera ditangani.

3.1.4 Evaluasi Produk

Evaluasi produk PPDB zonasi bertujuan untuk menilai hasil akhir pelaksanaan program, mencakup daftar ulang, distribusi siswa, integrasi data ke Dapodik, pelaporan pelaksanaan, serta dampak kebijakan terhadap akses dan kualitas pendidikan. Tahap daftar ulang atau lapor diri dilaksanakan secara daring melalui laman PPDB DKI Jakarta dan menunjukkan tingkat partisipasi yang tinggi. Pada tahun 2024, dua sekolah (SMAN 67 dan SMAN 81) mencatat 100% siswa melakukan lapor diri, sementara sekolah lainnya juga menunjukkan angka di atas 97%, mencerminkan tingginya kesadaran siswa dan efektivitas sistem. Dari sisi distribusi siswa, sistem zonasi telah mendorong siswa untuk bersekolah di lingkungan sekitar. SMAN 81, misalnya, didominasi oleh siswa dari zona terdekat (P1), sedangkan SMAN 67 dan SMAN 9 masih banyak diisi siswa dari luar zona inti. Hal ini mencerminkan perlunya penyesuaian zonasi dan peningkatan kapasitas di beberapa wilayah agar lebih merata.

Integrasi data hasil PPDB ke Dapodik menunjukkan konsistensi yang cukup tinggi. Selisih antara data PPDB (3.993 siswa dalam 3 tahun) dan data Dapodik (4.200 siswa) dijelaskan melalui adanya mutasi, siswa tinggal kelas, atau pindahan antardaerah. Dapodik yang bersifat dinamis tetap menjadi rujukan valid untuk perencanaan pendidikan. Dalam hal pelaporan pelaksanaan, proses berjalan

sistematis dan berjenjang. Sekolah melaporkan berbagai tahapan pelaksanaan PPDB ke dinas pendidikan dan pusat melalui mekanisme Monev. Sistem digital serta regulasi daerah mendukung keterbukaan dan akuntabilitas, sementara posko dan kanal pengaduan turut memperkuat transparansi.

Terakhir, dari segi dampak, sistem zonasi memberikan kontribusi besar dalam pemerataan akses pendidikan dan pengurangan kesenjangan sosial walau tantangan tetap ada, terutama pada penurunan capaian akademik dan motivasi siswa akibat keragaman kemampuan yang masuk melalui jalur zonasi. Menilai hasil atau dampak dari program, Maisondra (2016) menyebut bahwa penyamaan standar sekolah akan mendorong kepercayaan masyarakat terhadap semua sekolah. Namun, temuan penelitian ini justru menunjukkan bahwa masih terdapat penurunan motivasi belajar, ketimpangan kemampuan akademik antar siswa, serta pengunduran diri siswa dari sekolah negeri, seperti yang terjadi di SMAN 9. Ini memperkuat argumen bahwa tanpa peningkatan kualitas secara merata, sistem zonasi hanya mendistribusikan siswa tanpa menjamin kualitas hasil pendidikan. Merespons tantangan tersebut, sekolah membuat strategi seperti pembelajaran diferensiasi dan pendekatan pedagogis inovatif.

3.2 Faktor Penghambat

Pelaksanaan sistem zonasi dalam PPDB menghadapi beberapa tantangan utama. Pertama, sebaran sekolah negeri yang tidak merata antar kelurahan menjadi penghambat utama pemerataan akses pendidikan. Misalnya, Kelurahan Halim memiliki dominasi fasilitas pendidikan, sementara Kelurahan Makasar tergolong *blank spot* karena tidak memiliki SMA negeri, meskipun memiliki kepadatan penduduk tinggi. Kedua, terdapat ketidaksesuaian antara daya tampung yang ditetapkan dengan data yang muncul di sistem PPDB online, yang menciptakan kesenjangan administratif dalam proses seleksi. Hal ini menimbulkan kebingungan di kalangan calon peserta didik dan berpotensi mengurangi kepercayaan publik terhadap sistem.

Ketiga, muncul penurunan motivasi belajar dan capaian akademik. Karena sistem zonasi tidak mengutamakan prestasi akademik, siswa yang diterima memiliki latar belakang kemampuan yang beragam, sehingga kualitas input akademik menjadi kurang merata. Beberapa guru melaporkan menurunnya jumlah siswa yang lolos ke perguruan tinggi negeri dan meningkatnya siswa yang mengundurkan diri. Terakhir, perbedaan kemampuan akademik di dalam kelas menjadi tantangan nyata dalam proses pembelajaran. Latar belakang siswa yang sangat beragam menyebabkan ketimpangan kemampuan dalam mengikuti pelajaran. Hal ini berdampak pada dinamika kelas yang tidak seimbang dan menurunnya semangat belajar sebagian siswa.

Secara keseluruhan, meskipun sistem zonasi mendukung pemerataan akses, faktor-faktor di atas menunjukkan perlunya perbaikan, baik dari sisi distribusi infrastruktur, akurasi sistem seleksi, maupun penguatan kualitas pembelajaran di satuan pendidikan.

3.3 Upaya Mengatasi Faktor Penghambat

Pemerintah dan satuan pendidikan telah melakukan berbagai strategi untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan sistem zonasi. Pertama, dilakukan penataan wilayah zonasi berbasis RT, bukan jarak, dengan mempertimbangkan sebaran sekolah, domisili calon peserta didik, dan kapasitas sekolah. Pendekatan ini diharapkan mampu mengurangi ketimpangan akses, termasuk bagi wilayah yang mengalami *blank spot* seperti Kelurahan Makasar. Kedua, Dinas Pendidikan meluncurkan program PPDB Bersama bagi wilayah yang minim sekolah negeri. Program ini memungkinkan siswa dari daerah yang tidak memiliki SMA negeri untuk bersekolah di swasta mitra pemerintah dengan biaya terjangkau, sehingga tetap mendapat akses pendidikan.

Ketiga, monitoring dan pelaporan pelaksanaan PPDB dilakukan secara berlapis dan sistematis, melalui pengawasan langsung, sistem pengaduan daring, evaluasi pasca pelaksanaan, serta koordinasi

lintas instansi guna memverifikasi data zonasi dan domisili secara akurat. Keempat, untuk mengatasi keragaman kemampuan akademik siswa, sekolah menerapkan pembelajaran diferensiasi dan memperkuat pelatihan guru dalam strategi pengajaran inklusif. Langkah ini bertujuan agar semua siswa, meskipun memiliki latar belakang akademik yang berbeda, tetap dapat berkembang sesuai potensi masing-masing.

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Menurut Nurdin dan Hartati (2019) diskusi merupakan bagian dari laporan penelitian yang bertujuan untuk menginterpretasikan hasil temuan, mengaitkannya dengan teori yang relevan, serta membandingkannya dengan hasil penelitian terdahulu. Berdasarkan model evaluasi CIPP (Context, Input, Process, Product), penelitian ini menemukan bahwa sistem zonasi di Kecamatan Makasar berjalan cukup efektif dalam meningkatkan akses pendidikan secara merata, meskipun masih menghadapi tantangan dalam aspek kualitas input akademik dan pemerataan persebaran sekolah. Pertama, temuan mengenai meningkatnya pemerataan akses pendidikan melalui pendekatan zonasi RT di Kecamatan Makasar sejalan dengan temuan Sulistyosari et al. (2023) yang menunjukkan bahwa sistem zonasi dapat memperkecil kesenjangan pendidikan antar wilayah apabila disertai pemetaan zonasi yang kontekstual. Di Jakarta Timur, strategi berbasis RT memungkinkan segmentasi wilayah yang lebih adil karena mempertimbangkan kepadatan dan keterjangkauan geografis, yang belum sepenuhnya diulas dalam penelitian terdahulu. Kedua, berbeda dari penelitian Solehudin (2024) yang menyoroti bahwa keluarga miskin terhambat mengakses pendidikan karena keterbatasan dokumen administratif dan keterbatasan akses informasi, temuan di Kecamatan Makasar menunjukkan adanya inovasi berupa program PPDB Bersama. Program ini memungkinkan siswa dari wilayah dengan keterbatasan daya tampung sekolah negeri untuk diterima di sekolah swasta mitra, yang biayanya ditanggung oleh pemerintah daerah. Ini menjadi kontribusi penting dan solutif terhadap tantangan klasik dalam pelaksanaan zonasi.

Ketiga, sebagaimana disampaikan oleh Setiawan (2021), penelitian ini juga menemukan permasalahan terkait ketidaksesuaian daya tampung aktual sekolah negeri dengan kebutuhan peserta didik di wilayah tersebut. Terdapat kekurangan 19 kursi zonasi di lima SMA Negeri, yang menimbulkan kecemasan dan ketidakpuasan masyarakat, serta mengganggu kredibilitas sistem. Ini menunjukkan bahwa perencanaan input belum sepenuhnya mengantisipasi dinamika pertumbuhan penduduk usia sekolah. Keempat, hasil penelitian ini menguatkan temuan Sobri dan Sunandar (2023) tentang pentingnya kesiapan teknis dalam pelaksanaan zonasi. Meski sistem PPDB daring Jakarta sudah terintegrasi, pelaksanaan di Kecamatan Makasar tetap membutuhkan posko bantuan di sekolah untuk mengatasi kendala literasi digital orang tua dan peserta didik, serta gangguan teknis yang masih kerap terjadi pada masa pendaftaran.

Kelima, berlawanan dengan kesimpulan Bulkani et al. (2023) yang menyatakan bahwa jalur masuk sekolah tidak memengaruhi capaian akademik siswa, penelitian ini menemukan bahwa masuknya siswa melalui jalur zonasi dengan rentang kemampuan akademik yang sangat bervariasi mempengaruhi dinamika kelas dan berdampak pada motivasi belajar serta peningkatan angka siswa yang mengundurkan diri, khususnya di SMAN 9 dan SMAN 67. Temuan ini diperkuat dengan data wawancara guru dan rekapitulasi internal siswa. Keenam, penelitian ini menolak generalisasi temuan Winarti et al. (2023) yang menyatakan bahwa sistem zonasi menyebabkan penyusutan jumlah peserta didik dan bahkan penutupan sekolah di wilayah tertentu. Di Kecamatan Makasar, distribusi siswa tetap terjaga melalui strategi pelatihan guru dan penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Meskipun ada dominasi peserta didik P3 (zonasi radius jauh) di beberapa sekolah, sistem tetap mampu menampung dan mengelola perbedaan latar belakang akademik siswa. Ketujuh, temuan ini memperluas hasil

penelitian Mujahidah et al. (2024) yang mengevaluasi sistem zonasi SMP menggunakan model CIPP. Dalam konteks SMA di wilayah urban padat, aspek context dan input sudah relatif kuat, namun aspek process dan product masih memerlukan penguatan. Hal ini terutama terkait dengan optimalisasi sinergi sekolah-sekolah negeri dan swasta serta penyesuaian beban kerja guru dalam menangani keragaman karakter siswa.

Secara umum, penelitian ini memberikan kontribusi empiris terhadap pengembangan sistem zonasi di kawasan urban seperti Jakarta Timur, khususnya dengan mengusulkan pendekatan zonasi berbasis RT, penyediaan jalur alternatif seperti PPDB Bersama, serta pentingnya penguatan literasi digital orang tua dan siswa. Pendekatan ini dapat menjadi acuan dalam menyempurnakan kebijakan zonasi nasional yang inklusif dan adaptif terhadap konteks lokal. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa keberhasilan zonasi tidak hanya ditentukan oleh regulasi, tetapi juga oleh inovasi lokal, kapasitas teknis, dan keberpihakan kebijakan terhadap wilayah dengan keterbatasan daya tampung.

3.5 Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Temuan lainnya adalah peran sekolah swasta yang semakin aktif mengambil bagian dalam pemerataan akses pendidikan. Meskipun sebelumnya sekolah swasta kerap dipandang sebagai alternatif terakhir, pada masa pelaksanaan *PPDB Bersama*, beberapa sekolah swasta mitra justru mengalami peningkatan jumlah pendaftar dan mulai mengembangkan program beasiswa serta subsidi silang untuk siswa dari keluarga kurang mampu. Ini menunjukkan adanya transformasi peran sekolah swasta dari sekadar pelengkap menjadi mitra strategis pemerintah dalam pelaksanaan zonasi.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, pelaksanaan sistem zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMA di Kecamatan Makasar dapat dikatakan cukup efektif dalam meningkatkan pemerataan akses pendidikan, meskipun masih terdapat sejumlah hambatan signifikan yang menghambat optimalisasi kualitas pelaksanaannya. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pendekatan zonasi berbasis RT telah mendorong distribusi siswa yang lebih adil, namun belum sepenuhnya mengatasi ketimpangan geografis, terutama di wilayah blank spot seperti Kelurahan Makasar yang tidak memiliki SMA negeri maupun swasta.

Terdapat sejumlah faktor penghambat utama, yaitu:

1. Ketimpangan distribusi sekolah negeri antar kelurahan;
2. Ketidaksihesuaian antara daya tampung aktual dengan sistem PPDB online yang menciptakan kebingungan administratif;
3. Penurunan motivasi dan capaian akademik siswa akibat keragaman latar belakang input akademik;
4. Masih terbatasnya strategi pembelajaran yang mampu mengakomodasi perbedaan kemampuan siswa secara efektif.

Namun demikian, terdapat upaya adaptif yang signifikan, seperti:

1. Penataan zonasi berbasis RT,
2. Pelaksanaan PPDB Bersama sebagai alternatif untuk wilayah tanpa SMA negeri,
3. Pembelajaran diferensiasi oleh sekolah, serta
4. Penguatan pelaporan dan pengawasan teknis oleh dinas terkait.

Sistem zonasi di Kecamatan Makasar secara umum telah dilaksanakan sesuai dengan regulasi nasional dan daerah, serta mendapat dukungan dari infrastruktur teknologi seperti aplikasi PPDB online. Akan tetapi, untuk mencapai tujuan ideal berupa pemerataan sekaligus peningkatan kualitas

pendidikan, diperlukan peningkatan dalam penataan zonasi wilayah, pembangunan sekolah baru di wilayah padat, serta penguatan kapasitas tenaga pendidik untuk menghadapi tantangan input akademik yang beragam.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan dari sisi waktu dan cakupan wilayah. Penelitian hanya dilakukan di Kecamatan Makasar dan dalam 3 (tiga) minggu waktu pengumpulan data.

Arah Masa Depan Penelitian (*Future Work*)

Penulis menyarankan agar penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan cakupan yang lebih luas serta pendekatan campuran (*mixed method*) yang menggabungkan data kuantitatif dan kualitatif secara lebih mendalam. Selain itu, perlu dilakukan studi longitudinal untuk melihat dampak jangka panjang dari sistem zonasi terhadap motivasi belajar, prestasi akademik, dan keberhasilan siswa pasca sekolah menengah. Pemerintah daerah juga perlu segera mengambil langkah teknis strategis, seperti pembangunan unit sekolah baru dan peningkatan pelatihan guru, guna menutup celah ketimpangan yang masih terjadi dalam implementasi sistem zonasi.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, rahmat dan karunianya. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada kedua orang tua tercinta atas doa, dukungan, dan semangat yang tiada henti yang menjadi kekuatan utama dalam menyelesaikan karya ilmiah ini. Penulis juga menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Asep Hendra, S.E., M.M., selaku dosen pembimbing, atas segala bimbingan, arahan, dan ilmu yang telah diberikan selama proses penyusunan skripsi ini. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Ibu Dr. Rahmawati Sururama, S.STP., M.H., M.Si. dan Ibu Mesyy Faridah Hendiyani, S.STP., MPA. atas bantuan pemikiran dan diskusi yang sangat berharga dalam menganalisis temuan-temuan menarik pada penelitian ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Jakarta Timur, serta kepala sekolah, guru, siswa, dan orang tua di lima SMA Negeri di Kecamatan Makasar yang telah memberikan waktu, data, dan wawasan selama proses pengumpulan informasi. Tanpa partisipasi dan keterbukaan dari para informan, penelitian ini tidak akan dapat tersusun secara komprehensif.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Ardi, A., Danil, M., Murni, D., Gistituati, N., Rusdinal, R., & Hervi, F. (2023). The Implementation of Student Admission Based on Zoning in Indonesia : Problems, Challenges, and Solutions. *Jurnal Kependidikan: Jurnal Hasil Penelitian dan Kajian Kepustakaan di Bidang Pendidikan, Pengajaran dan Pembelajaran*, 9(3), 914-923. [doi:https://doi.org/10.33394/jk.v9i3.8632](https://doi.org/10.33394/jk.v9i3.8632)
- Baskara, A. (2023). Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru (Ppdb) Tingkat SMA Negeri Tahun Ajaran 2021/2022 di Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara (Doctoral dissertation, Institut Pemerintahan Dalam Negeri). <http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/15033>
- Bulkani, B., Fatchurahman, M., & Setiawan, M. A. (2023). Zonation System In Admission Of New Student At State Secondary School In Indonesia: How Predictable To Learning Success. *Obrazovanie i Nauka*, 25(8). <https://doi.org/10.17853/1994-5639-2023-8-115-133>

- Hartati, I. N. dan S. (2019). Metodologi Penelitian Sosial & Pendidikan. In *Media Sahabat Cendekia*.
- Hendrawansyah, H., & Zamroni, Z. (2020). Evaluasi Kebijakan Sistem Zonasi dalam Penerimaan Siswa Baru Sekolah Menengah Atas. *Jurnal Kependidikan: Penelitian Inovasi Pembelajaran*, 4(1). <https://doi.org/10.21831/jk.v4i1.27007>
- Kellaghan, T., & Stufflebeam, D. L. (2003). International handbook of education evaluation. Part 2: Practice. In *Kluwer International Handbooks of Education* (Vol. 9). https://books.google.co.id/books?id=I7YqBgAAQBAJ&lpg=PA1&ots=BI_pOXgm17&lr&hl=id&pg=PA302#v=onepage&q&f=false
- Ma'rifatin, S., Yusuf Sobri, A., & Sunandar, A. (2023). The Impact of New Student Admission Policy based on Zoning System. *International Journal of Research and Innovation in Social Science*, 07(02). <https://doi.org/10.47772/ijriss.2023.7205>
- Maisondra. (2016). Menyamakan Standar Sekolah Sebagai Inovasi Pemerintah Daerah Dalam Pelayanan Publik Bidang Pendidikan [Institut Pemerintahan Dalam Negeri]. <https://doi.org/10.21831/ijp.v4i1.27007>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1992). Analisis data kualitatif : buku sumber tentang metode metode baru / Matthew B. Miles, A. Michael Huberman ; penerjemah, Tjetjep Rohendi ; pendamping, Mulyarto. In *Qualitative data analysis*.
- Mujahidah, A., Kumairo, M. N., & Hazin, M. (2024). Evaluasi Program PPDB Sistem Zonasi Di Kabupaten Sidoarjo Menggunakan Model CIPP. *Sindoro: Cendikia Pendidikan*, 4(6), 44-54. <https://doi.org/10.9644/sindoro.v4i5.3317>
- Solehudin, R. H. (2024, December). The urgency of zonation policy in online acceptance of senior high school level students and its impact on equivalent education quality in the province of the special capital region of Jakarta. In *AIP Conference Proceedings* (Vol. 3148, No. 1). AIP Publishing. <https://doi.org/10.1063/5.0242930>
- Sulistiyosari, Y., Wardana, A., & Dwiningrum, S. I. A. (2023). School zoning and equal education access in Indonesia. *International Journal of Evaluation and Research in Education*, 12(2). <https://doi.org/10.11591/ijere.v12i2.22488>
- Sururama, R., & Vowel, V. C. (2021). The Department of Education and Culture's Strategy to Address Educator Shortage in Pontianak. *AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan*, 13(3). <https://doi.org/10.35445/alishlah.v13i3.1441>
- Simangunsong, F. (2016). Buku Metodologi Penelitian Pemerintahan: Teoritik, Legalistik, Empirik, Inovatif. Alfabeta.
- Stufflebeam, D. L. (2000). The CIPP Model for Evaluation. *Evaluation Models*.
- Winarti, N., Rahmi, K., & Charin, R. O. P. (2023). Harapan Pemerataan Menghadirkan Kesenjangan: Analisis Dampak Kebijakan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Kota

